



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
perkimpertanahan.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 80 /SK-PERKIMTAN/2020

Tentang

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KEGIATAN-KEGIATAN DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sumber dana APBD Tahun 2020 perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kelancaran pekerjaan.
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-14-2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat tersebut pada Diktum Pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan guna tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2020 dari segi fisik dan keuangan secara efisien dan efektif.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- dan


c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 16 Januari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


Ir. AKHIRUDDIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631001 199103 1 006

Tembusandisampaikan **kepada Yth :**

1. Sdr. Sekretaris, Kabid di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : /SK-PERKIMTAN/2020

Tanggal : Januari 2020

No	Nama / Nip.	Jabatan	Kegiatan
1	EFRIZAL THAMRIN, S.Sos, MM 19710331 200701 1 004	PPTK	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Sopir Kantor 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan luar Daerah 8. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi 9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan 13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15. Penatausahaan Keuangan SKPD 16. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
2.	DANTAS, A.Md 19810608 200604 1 004	PPTK	1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
3.	Ir. NOVIA 19631105 199202 2 001	PPTK	1. Penguatan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Revisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat
4.	Ir. EMA YULIS 19630503 199703 2 001	PPTK	1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat
5.	MARWANDI, ST 19790316 200604 1 021	PPTK	1. Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
6.	EFNI USLINDA, ST, M.Eng 19690517 199703 2 005	PPTK	1. Perencanaan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
7.	VIKI RAHMAT TIANDRA, ST 19840907 201101 1 002	PPTK	1. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
8.	WIRDAWATI, SE 19691228 199203 2 008	PPTK	1. Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumbar 2. Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi
9.	ANTOS LUKMAN, S.STP, MPA 19810530 199912 1 003	PPTK	1. Bimtek Pengelolaan Pertanahan 2. Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan 3. Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
10.	FITRA YENIFA, SH, MM 19670610 200701 2 005	PPTK	1. Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah 2. Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. AKHIRUDDIN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19631001 199103 1 006